

TESIS

**PENGARUH UPAH MINIMUM, INFLASI DAN INVESTASI TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI PULAU SULAWESI**

***THE EFFECT OF MINIMUM WAGE, INFLATION AND INVESTMENT IN
ECONOMIC GROWTH AND POVERTY ON THE ISLAND OF
SULAWESI***

MARYANA NINGSIH

A032211007



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**

TESIS

**PENGARUH UPAH MINIMUM, INFLASI DAN INVESTASI TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI PULAU SULAWESI**

***THE EFFECT OF MINIMUM WAGE, INFLATION AND INVESTMENT IN
ECONOMIC GROWTH AND POVERTY ON THE ISLAND OF
SULAWESI***

MARYANA NINGSIH

A032211007



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**

TESIS

PENGARUH UPAH MINIMUM, INFLASI DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI PULAU SULAWESI

Disusun dan diajukan oleh

MARYANA NINGSIH
A032211007

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian
Studi Program Magister **Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

pada tanggal **30 Agustus 2024**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Nursini, S.E., MA
NIP. 19660717 199103 2 001



Dr. Sabir, S.E., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

Ketua Program Studi Magister
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,



Dr. Indraswati Tri Abdireviane SE..MA. CWM®
NIP. 19651012 199903 2 001



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 19640205 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Maryana Ningsih

Nim : A032211007

Jurusan/program studi : Magister Ekonomi Pembangunan dan
Perencanaan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

PENGARUH UPAH MINIMUM, INFLASI DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI PULAU SULAWESI

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ ditulis/ diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 26 September 2024

Yang membuat pernyataan,



Handwritten signature of Maryana Ningsih.

Maryana Ningsih

PRAKATA

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah senantiasa memberi nikmat baik kesehatan maupun keselamatan dan atas izin-Nya penulis mampu dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum, Inflasi dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Pulau Sulawesi”. Shalawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW., semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kelemahan serta kekurangan dalam penulisan karya ini terkait dengan berbagai keterbatasan maupun penulis. Namun dengan dorongan, bimbingan, saran, masukan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Diharapkan tulisan ini dapat memberi manfaat dan implikasi dalam semakin memperkaya khazanah ilmu pengetahuan ke depan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Indraswati Tri Abdi Reviane. S.E., MA., CWM® selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Prof. Dr. Nursini, S.E., MA. Selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Sabir, S.E., M.Si. CWM® selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu

dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Dosen penguji Bapak Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA, Ph.D. Bapak Dr. Agussalim, S.E., M.Si. dan Ibu Dr. Fatmawati, S.E., M.Si. CWM® Terima kasih atas saran, arahan dan ilmu yang bermanfaat sehingga saya dapat memperbaiki dengan baik tesis ini.
6. Untuk keluarga terkhususnya untuk orang tua saya tercinta Ayah dan Ibu serta saudara, terima kasih atas segala doa, dukungan, selalu setia membantu dalam hal material dan moril selama menjalani proses perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan “MEPP 2021 tanpa terkecuali” yang selalu memberi semangat, dukungan, doa, serta bantuan dalam hal apapun. Teman-teman di S1 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terima kasih atas dukungan dan doa untuk dapat melangkah hingga seperti sekarang.
8. Untuk seluruh teman-teman diluar lingkungan kampus yang banyak membantu dalam hal apapun itu hingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik, terima kasih banyak.

Penulis juga mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika selama proses penulisan terdapat sikap ataupun perkataan yang kurang berkenang di hati.

Makassar, 08 November 2024

Maryana Ningsih

ABSTRAK

MARYANA NINGSIH. *Pengaruh Upah Minimum, Inflasi, dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Pulau Sulawesi* (dibimbing oleh Nursini dan Sabir).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh upah minimum, inflasi, dan investasi terhadap kemiskinan secara langsung dan tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi. Penelitian ini menggunakan *time series* data sekunder dengan periode waktu tahun 2010 – 2022. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *path analysis* (analisis jalur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum dan investasi berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan, sedangkan inflasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan. Upah minimum dan investasi secara tidak langsung berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan inflasi secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: upah minimum, inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan



ABSTRACT

MARYANA NINGSIH. *The Impact of Minimum Wage, Inflation, and Investment on Economic Growth and Poverty in Sulawesi Island* (supervised by Nursini and Sabir)

The study aims to analyze the effects of minimum wage, inflation, and indirect investment on poverty through direct and indirect economic growth in Sulawesi Island. The research used a secondary time series with a time period of 2010-2022. The method of analysis used in this research was for path analysis. Studies indicate minimum wage and investment directly affect poverty. Inflation has no direct effect on poverty. Minimum wage and indirect investments affect poverty through economic growth. Meanwhile, inflation indirectly has no effect on poverty through economic growth.

Keywords: minimum wage, inflation, investment, economic growth, poverty



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN | iii |
| PRAKATA | iv |
| ABSTRAK | iv |
| ABSTRACT | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR TABEL | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 13 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 14 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian | 14 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS | 15 |
| 2.1 Landasan Teori dan Konsep | 15 |
| 2.1.1 Teori Kemiskinan | 15 |
| 2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi | 22 |
| 2.1.3 Upah Minimum | 25 |
| 2.1.4 Inflasi | 29 |
| 2.1.5 Investasi | 34 |
| 2.2 Keterkaitan Antar Variabel | 37 |
| 2.3 Kajian Empiris | 45 |
| BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS | 48 |
| 3.1 Kerangka Konseptual | 48 |
| 3.2 Hipotesis | 50 |
| BAB IV METODOLOGI PENELITIAN | 51 |
| 4.1 Jenis dan Lokasi Penelitian | 51 |
| 4.2 Pendekatan Penelitian | 51 |

| | |
|--|-----------|
| 4.3 Sumber Data | 51 |
| 4.4 Metode Pengumpulan Data..... | 52 |
| 4.5 Teknik Analisis Data..... | 52 |
| 4.6 Definisi Operasional Variabel..... | 55 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 56 |
| 5.1 Deskripsi Data | 56 |
| 5.2 Deskripsi Hasil Penelitian | 62 |
| 5.3 Pembahasan | 66 |
| BAB VI PENUTUP | 81 |
| 6.1 Kesimpulan | 81 |
| 6.2 Saran | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
| LAMPIRAN | 94 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----------|
| Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin..... | 4 |
| Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi..... | 7 |
| Gambar 1.3 Upah Minimum | 9 |
| Gambar 1.4 Inflasi | 10 |
| Gambar 1.5 Investasi | 11 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Persentase Jumlah Penduduk Miskin | 57 |
| Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi | 58 |
| Tabel 4.3 Upah Minimum..... | 59 |
| Tabel 4.4 Inflasi | 61 |
| Tabel 4.5 Realisasi Investasi | 61 |
| Tabel 4.6 Pengaruh Antar Variabel | 62 |
| Tabel 4.7 pengaruh tidak langsung antar variabel..... | 63 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang masih dihadapi oleh negara Indonesia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak memiliki harta, berpenghasilan rendah, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti sandang, pangan, papan, pelayanan, pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Kondisi ini terjadi ketika sumber daya keuangan dan material yang dimiliki seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fundamentalnya.

Masalah kemiskinan merupakan tantangan utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pulau Sulawesi, dengan keberagaman suku dan budaya yang kaya, masih menghadapi tantangan serius terkait kemiskinan. Kesenjangan pendapatan yang tinggi antara wilayah perkotaan dan pedesaan merupakan masalah mendasar yang harus ditangani. Masyarakat di kota-kota besar umumnya memiliki tingkat pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di daerah pedesaan atau wilayah terpencil. Selain itu, masih banyak penduduk Pulau Sulawesi yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendapatan, seperti lapangan pekerjaan yang memadai dan kepemilikan aset produktif, menjadi penyebab utama rendahnya pendapatan. Permasalahan lain yang turut memperburuk kondisi kemiskinan di Pulau Sulawesi adalah adanya guncangan ekonomi, seperti bencana alam atau krisis ekonomi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang dianggap miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan. Karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan bertambahnya jumlah penduduk miskin, yang membuat kemiskinan terus memburuk. Kemiskinan merupakan masalah yang mendesak dan persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah karena cukup sulit untuk diatasi. Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp 10.739 per orang per hari atau Rp 322.170 per orang per bulan.

Booth dan Me Cawley (dalam Moeljarto T., 1995) menyatakan bahwa di banyak negara memang terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pendapatan per kapita, tetapi hal itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat, sedangkan sebagian besar masyarakat miskin kurang memperoleh manfaat apa pun, bahkan sangat dirugikan. Untuk memecahkan masalah ini, diperlukan kebijakan yang tepat dengan mengidentifikasi golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Umumnya, suatu keadaan disebut miskin bila ditandai oleh kekurangan atau ketidakmampuan memenuhi tingkat kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa kekurangan aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa kekurangan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan pendidikan yang relatif rendah.

Terkadang kemiskinan terjadi karena adanya kondisi yang memaksa seseorang menjadi miskin, seperti krisis ekonomi, serta gaya hidup dan budaya

yang mengakibatkan masyarakat Indonesia menjadi miskin. Hal ini diperparah dengan banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan. Garis kemiskinan didasarkan pada pendapatan yang mengacu pada dimensi kesejahteraan. Namun, ukuran ini tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan, tetapi dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Selain itu, perbedaan antarwilayah juga merupakan ciri kemiskinan, yang tercermin dari adanya perbedaan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Kemiskinan lebih dominan terjadi di masyarakat perdesaan (Bank Dunia, 2000).

Menurut Sharp dalam Kuncoro (2001), terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan berkualitas rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah dan upahnya pun rendah. Penyebab kualitas sumber daya manusia yang rendah adalah tingkat pendidikan yang rendah, nasib yang kurang beruntung, atau faktor keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses dan permodalan.

Di sisi lain, permasalahan kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan juga akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Selain itu, kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan juga akan memberikan dampak instabilitas sosial, ketidakpastian, dan tragedi kemanusiaan seperti kelaparan, tingkat kesehatan yang rendah dan gizi buruk. Bila keadaan tersebut terus berlanjut pada akhirnya akan mengganggu stabilitas ekonomi makro dan

kelangsungan pemerintahan yang ada. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, masih banyak penduduk yang memiliki pendapatan dibawah standar kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan ekonomi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut. Jadi pertumbuhan PDB yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Pulau Sulawesi adalah nama Pulau di Indonesia yang berada ditengah kepulauan Maluku dan Pulau Kalimantan. Pulau Sulawesi adalah kepulauan terbesar ke-11 di dunia. Pulau Sulawesi itu sendiri memiliki 6 provinsi yaitu, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Tingginya angka kemiskinan di beberapa daerah ini aka sangat mempengaruhi kinerja perekonomian. Seperti data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik masing-masing provinsi di Pulau Sulawesi disajikan dalam grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi (diolah), 2024

Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2018-2022

Pada Grafik 1.1 diatas dapat dilihat bahwa secara rata-rata kemiskinan di Pulau Sulawesi mengalami fluktuasi. Provinsi Sulawesi Selatan menjadi

wilayah yang mengalami jumlah penduduk miskin tertinggi dari tahun 2018-2022. Jumlah penduduk miskin ini didominasi oleh daerah pedesaan, dibanding dengan wilayah lainnya. Tingkat kemiskinan di daerah pedesaan masih sangat tinggi, terdapat sejumlah faktor penyebab terjadinya kemiskinan di daerah pedesaan antara lain adanya keterbelakangan dan ketinggalan sumber daya manusia (SDM), ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima dan akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi di desa hal ini mengakibatkan rendahnya akumulasi modal sehingga penciptaan lapangan pekerjaan rendah.

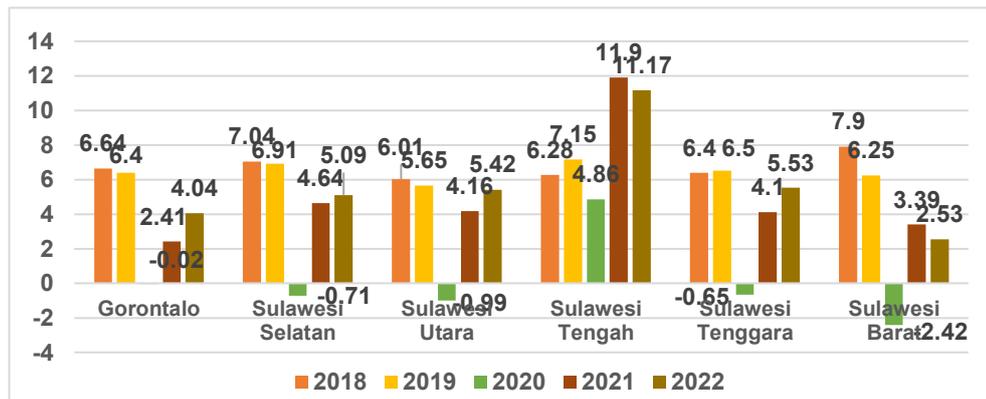
Tingginya jumlah penduduk miskin disuatu daerah tentu akan menjadi beban pembangunan, sehingga peran pemerintah dalam mengatasinya pun akan semakin penting. Alokasi dana APBN/APBD untuk program-program penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan berhasil apabila jumlah penduduk miskin mengalami penurunan atau bahkan tidak ada lagi. Namun, fakta menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan senantiasa perlu dicermati dan dikaji ulang, khususnya dalam penyusunan dan penerapan strategi program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah. Kemiskinan di beberapa wilayah di Indonesia masih menjadi masalah yang sangat serius, terutama di beberapa wilayah Provinsi di Pulau Sulawesi.

Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin terendah setelah Provinsi Gorontalo. Berdasarkan grafik di atas, Sulawesi Barat mencatat kemajuan yang paling lambat, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu selama periode tersebut, terjadi inflasi yang cukup rendah, sehingga masyarakat mengeluarkan konsumsi lebih banyak secara kuantitatif dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Pada periode yang sama, terjadi deflasi di komoditas transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan suatu indikator yang penting untuk dapat melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap negara akan selalu bekerja keras agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Setiap negara diseluruh negara syarat utama bagi terciptanya penurunan angka kemiskinan ialah dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (Nafi'ah, B. (2021).

Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator keberhasilan pembangunan. Sedangkan tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui redistribusi pendapatan (Kakwani dan Son, 2003). Berbagai upaya pro-rakyat kecil telah dilakukan untuk memampukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengentasan permasalahan kemiskinan telah banyak diupayakan, di antaranya melalui perbaikan kualitas ekonomi di suatu daerah, yang diukur dari beberapa aspek. Di antara upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan adalah dengan memperbaiki pertumbuhan ekonomi (Silva dan Sumarto, 2014).

Keadaan ini akan lebih parah lagi jika laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi juga melambat atau rendah. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator untuk melihat kinerja perekonomian baik di tingkat nasional maupun regional. selain itu, pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Berikut data pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Sulawesi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi (diolah), 2024

**Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Di Pulau Sulawesi
Tahun 2018-2022**

Pada Grafik 1.2 diatas laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi menunjukkan fluktuasi pada tahun 2018-2022, laju pertumbuhan ekonomi dalam kurung waktu 5 tahun diatas menunjukkan rata-rata meningkat setiap tahunnya dan mengalami penurunan pada saat terjadinya pandemi covid-19. Provinsi Sulawesi Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat daripada Provinsi lainnya. Pertumbuhan terjadi hampir di semua lapangan usaha dengan pertumbuhan kumulatif tertinggi pada lapangan usaha industri pengolahan. Pertumbuhan yang cukup tinggi juga terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum.

Angka laju pertumbuhan ekonomi rata-rata meningkat setiap tahunnya dan mengalami penurunan pada saat pandemi covid-19. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, sebagian besar manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut belum dapat dirasakan oleh masyarakat miskin. Distribusi pendapatan yang tidak merata, terutama di sektor ekstraktif, menjadi penyebab kemiskinan di beberapa daerah. Peningkatan pendapatan dari sektor ekonomi yang dominan tidak selalu menciptakan lapangan kerja yang merata, meninggalkan sebagian masyarakat dengan keterbatasan akses terhadap

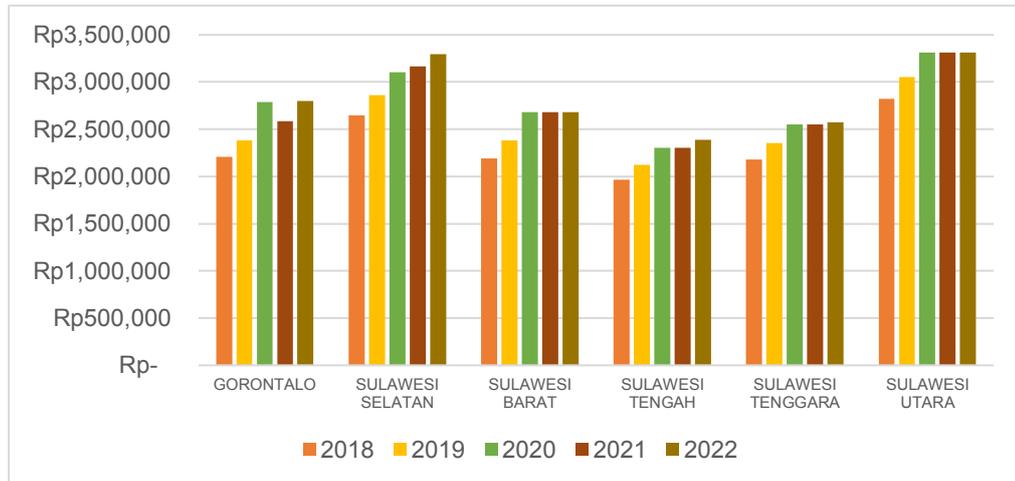
peluang ekonomi. sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum mampu menurunkan kemiskinan.

Sedangkan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat melambat, dipengaruhi oleh Covid-19 yang diperkirakan masih memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi Sulawesi Barat. Hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi covid-19 sehingga belanja pemerintah yang diharapkan sebagai stimulus fiskal ekonomi menjadi tersendat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa di Provinsi Sulawesi Barat belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata sehingga belum mampu menurunkan kemiskinan. Jika ekonomi melambat maka pendapatan masyarakat akan stagnan bahkan semakin menurun, saat pendapatan mereka menurun maka standar kehidupan mereka pun ikut menurun. Dimana sangat diharapkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Setiap wilayah mempunyai tujuan yang sama yaitu bagaimana cara untuk mempercepat pertumbuhannya.

Pertumbuhan ekonomi menjadi syarat mutlak untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa. Bila suatu wilayah tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya maka akan menimbulkan masalah ekonomi dan sosial yang baru seperti, tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi (Todaro, 2005). Pertumbuhan ekonomi mampu menjadikan kekuatan pendorong untuk menghasilkan suatu kekayaan yang nanti untuk memberantas kemiskinan dan semua masalah yang menyangkutnya (Cremin & Nakabugo, 2012).

Selain masalah diatas upah minimum juga salah satu variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Penetapan upah yang dilakukan pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap tingginya jumlah penduduk miskin yang ada. Semakin besar upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan

jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut. Upah adalah harga tenaga kerja. Upah tenaga kerja sangat penting untuk kedua belah pihak guna tetap menjaga berlangsungnya kegiatan ekonomi diantara mereka. Bagi pihak produsen atau perusahaan upah merupakan bagian dari biaya produksi yang harus dikeluarkan agar kegiatan produksi dapat berlangsung.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi (diolah), 2024

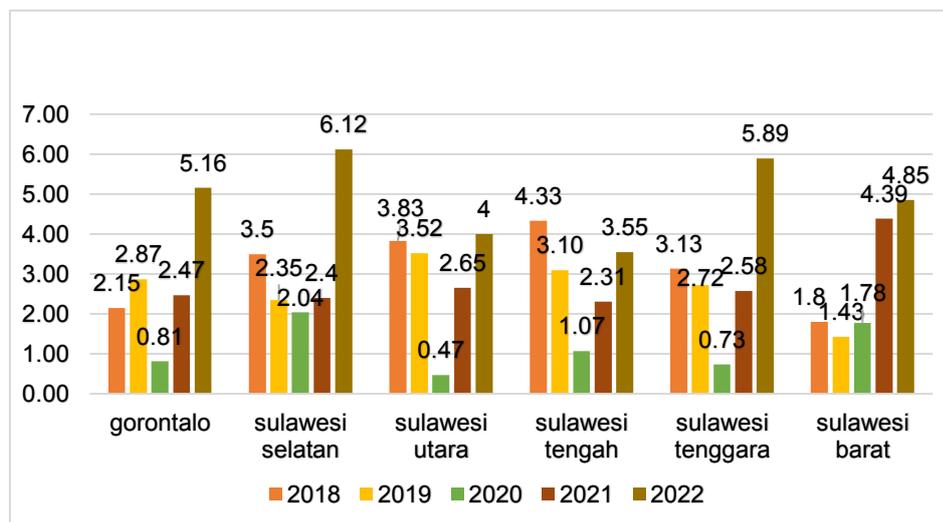
Tabel 1.3 Upah Minimum Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2018-2022

Grafik 1.3 diatas dapat dilihat secara konsisten tingkat rata-rata upah minimum di 6 Provinsi ini terus meningkat, tujuannya adalah meningkatkan upah bagi pekerja dengan gaji rendah. Penerapan kebijakan upah minimum di Pulau Sulawesi sendiri diterapkan agar menjadi batas minimum bagi perusahaan dalam memberikan upah terhadap pekerja. Diharapkan dengan upah yang meningkat setiap tahun sesuai dengan kebutuhan layak dan berbagai pertimbangan lainnya ikut meningkat sehingga nominal upah terus disesuaikan. Pengaruh dari kebijakan upah minimum sendiri di Indonesia khususnya di Pulau Sulawesi masih menjadi perdebatan.

Tidak semua masyarakat mempunyai pendapatan sesuai upah minimum yang telah ditetapkan didaerahnya, standar kebutuhan hidup

minimum yang ditetapkan dan kebutuhan hidup layak kurang sesuai nominalnya sehingga masyarakat masih merasa kurang dalam mencukupi kebutuhannya. Melihat dengan kondisi ini perlu ada evaluasi dari pemerintah terhadap upah minimum dimana upah minimum bisa disesuaikan dengan kebutuhan standar kelayakan hidup sehingga nantinya masyarakat dapat menerima upah yang sesuai.

Apakah kebijakan upah minimum ini bisa mengatasi masalah upah rendah dan memerangi kemiskinan atau sebaliknya, apakah dengan upah minimum diterapkan akan membuat kesempatan kerja baik di sektor formal ataupun informal menjadi berkurang dan terjadi pemutusan hubungan kerja yang masif. Selain itu, apakah kebijakan ini bisa mempengaruhi rata-rata upah di pasar tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah kemiskinan menjadi berkurang (Ardhian, dkk, 2017).

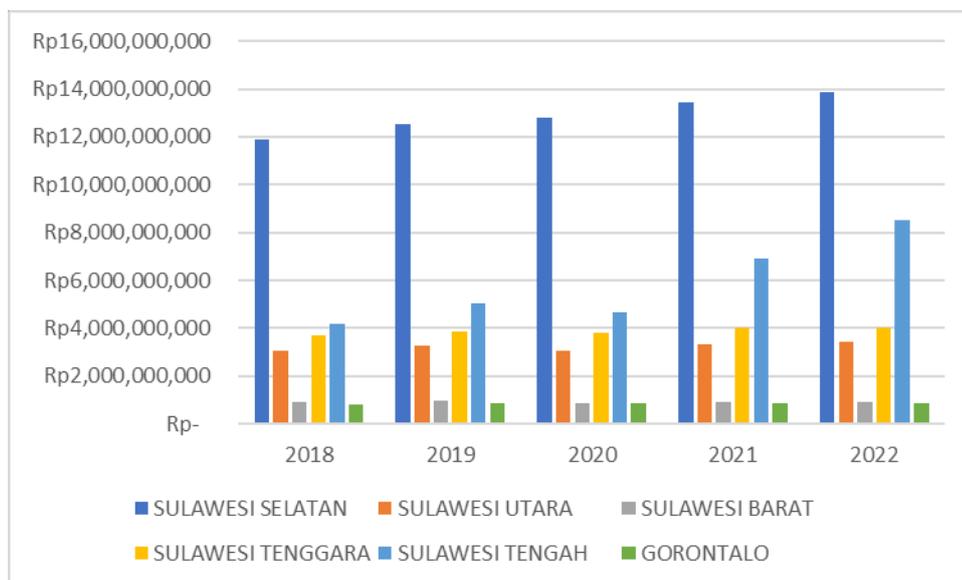


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi (diolah), 2024

Grafik 1.4 Inflasi Menurut Provinsi Di Pulau Sulawesi Tahun 2018-2022

Pada grafik 1.4 Laju inflasi dalam perekonomian di Pulau Sulawesi menunjukkan adanya fluktuasi setiap tahunnya dari 2018-2022 yang dimana laju pertumbuhannya paling pesat yaitu di tahun 2022 dimana pada saat itu Indonesia mengalami pandemi covid-19 yang mengakibatkan tingkat

kemiskinan menjadi tinggi begitupun inflasi juga tinggi. Laju pertumbuhannya diupayakan rendah dan stabil karena semakin tinggi tingkat inflasi, maka masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan adanya harga barang dan jasa yang tinggi tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga menimbulkan kemiskinan dari tahun ke tahun. Menurut keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya (Sukirno, 2013). Selain itu inflasi dapat juga terjadi karena harga barang-barang meningkat sedangkan tingkat upah masyarakat tetap (Sari & Natha, 2016).



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi (diolah), 2024

Grafik 1.5 Investasi Menurut Provinsi Di Pulau Sulawesi Tahun 2018-2022

Grafik 1.5 diatas dilihat bahwa tingkat investasi menurut PMDN di 6 Provinsi di Pulau Sulawesi mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2022. Pembentukan pola investasi yang tidak merata pada setiap wilayah akan menyebabkan perbedaan pertumbuhan pendapatan masing-masing sektor perekonomian, sering kali investasi yang terjadi di daerah tidak memberikan dampak yang menguntungkan bagi daerah tersebut, yang dimana tidak menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja asli daerah dan sering

kali mengambil tenaga kerja dari luar daerah, tenaga kerja daerah asal tidak mempunyai kesempatan untuk meningkatkan penadapatan mereka akibat investasi yang terjadi dan tidak memberikan dampak penurunan jumlah penduduk miskin (Leli dan Effendi, 2019).

Investasi menjadi salah satu kunci dalam setiap pembicaraan tentang konsep ekonomi. Wacana pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru serta penanggulangan kemiskinan pada akhirnya menempatkan investasi sebagai pendorong utama mengingat perekonomian yang digerakkan oleh konsumsi diakui amat rapuh (Didi, 2005). Salah satu variabel penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Menurut Harrod-Domar untuk bisa tumbuh diperlukan adanya investasi yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan modal (Todaro & Smith, 2011).

Maka dari itu, beberapa alasan yang mendasari pemilihan indikator terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi diantaranya upah minimum dimana upah minimum terus meningkat setiap tahunnya, peningkatan upah minimum ini diharapkan mampu memperbaiki kesejahteraan pekerja, mereduksi kesenjangan dengan meningkatkan pendapatan bagi kalangan pekerja rendah. Kebijakan upah minimum meningkatkan probabilitas untuk penduduk miskin keluar dari jeratan kemiskinan. Inflasi juga merupakan salah satu indikator perekonomian yang penting, karena laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar tidak menimbulkan penyakit makro ekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Sedangkan untuk mengurangi kemiskinan perlu adanya investasi sebagai sumber pembangunan ekonomi modernisasi, pertumbuhan pendapatan, ketenagakerjaan, pengurangan kemiskinan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Investasi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi,

penting untuk menentukan strategi investasi yang akan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Triyodo, 1996).

Dalam penyelesaian masalah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu sektor penting. Namun jika hanya pertumbuhan ekonomi saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan jika tidak dibarengi dengan pemerataan pendapatan (Wongdesmiwati, 2009).

Berdasarkan problematika yang dijelaskan, peneliti merasa perlu mengetahui seberapa besar pengaruh variabel makro yakni upah minimum, inflasi, dan investasi terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi 6 provinsi di Pulau Sulawesi dengan judul **“PENGARUH UPAH MINIMUM, INFLASI DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI PULAU SULAWESI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi?
- 2) Apakah inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi?
- 3) Apakah investasi berpengaruh terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi?
- 4) Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Pulau Sulawesi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh investasi terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi.
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai:

1. Kegunaan Teoritis

Semoga dalam penelitian ini dapat memberi manfaat kepada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya masalah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan masyarakat di Pulau Sulawesi.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam bidang perencanaan dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Pulau Sulawesi khususnya dalam penentuan kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah di masa akan datang.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Kemiskinan

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan itu sendiri (Badan Pusat Statistik, 2017). Menurut Yacoub (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Menurut World Bank (2004) salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*).

Penelitian ini mengkaji pengaruh upah minimum, inflasi dan investasi melalui pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Pulau Sulawesi. Dengan demikian, Menurut Nurkse dalam teorinya mengemukakan tentang lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan: ”suatu negara menjadi miskin karena ia merupakan negara miskin”. Menurut pendapatnya, inti dari lingkaran setan kemiskinan

adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi.

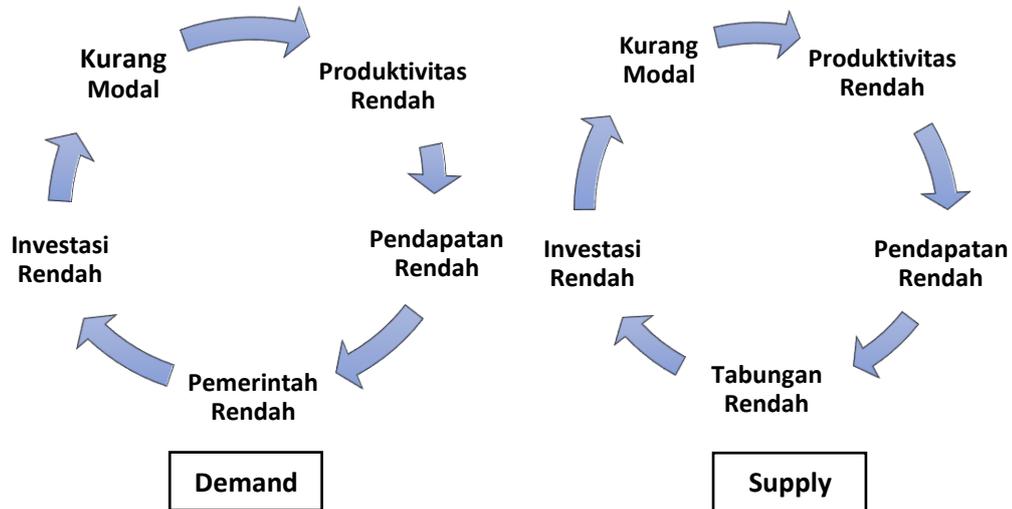
Negara terbelakang umumnya terjatuh ke dalam apa yang disebut "lingkaran setan kemiskinan" Nurkse menjelaskan: "Lingkaran setan mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin tetapi berada dalam keadaan melarat. Si miskin, misalnya, selalu kurang makan; karena kurang makan, kesehatannya menjadi buruk; karena fisiknya lemah kapasitas kerjanya rendah penghasilannya pun rendah, dan itu berarti miskin, akhirnya ia tidak akan mampu mempunyai cukup makan; dan seterusnya. Bila keadaan ini dikaitkan dengan negara secara keseluruhan dapat dikemas ke dalam dalil kuno. Suatu negara dikatakan miskin karena ia miskin.

Penyebab kemiskinan bermula pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Kemiskinan menurut Murbyarto dalam Safii (2010) adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari oleh kekuatan yang ada padanya.

Lingkaran kemiskinan yaitu suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan menjalani banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Penyebab kemiskinan bermula pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) dari Nurkse 1953. Ragnar Nurkse (dalam Kuncoro, 2006) mengungkapkan bahwa

adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menjadi penyebab produktivitas rendah sehingga pendapatan diterima rendah berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi menyebabkan keterbelakangan.

Gambar 2. 1 Lingkaran Setan Kemiskinan



Sumber: Nurkse (1953) dalam Mudrajat Kuncoro, 2000

Nurkse menjelaskan dua lingkaran perangkap kemiskinan dari segi penawaran (supply) dan permintaan (demand). Segi penawaran menjelaskan bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang rendah akibat tingkat produktivitas rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Rendahnya kemampuan menabung masyarakat menyebabkan tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah, sehingga terjadi kekurangan modal dan dengan demikian tingkat produktivitasnya yang juga rendah, sebagai akibat dari tingkat produktivitas juga akan rendah dan begitu seterusnya, sedangkan dari segi permintaan menjelaskan di negara-negara yang miskin rangsangan untuk menanamkan modal sangat rendah karena keterbatasan luas pasar untuk berbagai jenis barang. Hal ini disebabkan pendapatan masyarakat yang sangat rendah karena produktivitasnya yang juga rendah,

sebagai akibat dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan kekurangan rangsangan untuk menanamkan modal.

Kemiskinan merupakan kondisi hidup seseorang yang merujuk pada keadaan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup pokoknya dan tidak dapat menikmati kehidupannya dalam hal kesehatan, ibadah menurut agamanya, pendidikan, pekerjaan, pendapatan yang tinggi dan standar hidup yang layak. Si miskin misalnya selalu kurang makan, karena kurang makan, kesehatannya menjadi buruk, karena fisiknya lemah kapasitas kerjanya rendah, karena kapasitas kerjanya rendah penghasilannya pun rendah dan itu berarti ia miskin, akhirnya ia tidak akan mempunyai cukup makan dan seterusnya. Bila keadaan seperti ini dikaitkan dengan negara secara keseluruhan dapat dikemas ke dalam dalil kuno: "Suatu negara miskin karena ia miskin" (Jhingan, M.L, 2010).

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara sunyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Namun, penelitian ini membatasi kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin

adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Menurut Munkner & Walter (2001) dalam Adawiyah (2020), kemiskinan ditimbulkan oleh faktor-faktor penyebab dan dimensi-dimensi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung apakah kelompok miskin tinggal di perdesaan atau di perkotaan, dan apakah mereka hidup dalam struktur keluarga kecil, keluarga inti atau seorang diri. Beberapa sudut pandang tentang penyebab kemiskinan, yaitu: a) apabila rendahnya sumber daya dan persyaratan-persyaratan perdagangan yang tidak menguntungkan dipandang sebagai penyebab utama kemiskinan, maka peningkatan produktivitas, akses ke pasar, harga yang wajar untuk produk-produk yang dihasilkan oleh kaum miskin merupakan langkah yang tepat dalam memberantas kemiskinan. b) apabila buruknya kondisi lingkungan alam dipandang sebagai penyebab krusial dari meluasnya kemiskinan, maka penggunaan sumber daya alam yang lebih bijaksana dan praktik-praktik yang berorientasi ekologis merupakan jalan keluarnya. c) apabila rendahnya tingkat pengetahuan dan akses kepada informasi, pendidikan, pelatihan dan bimbingan sebagai penyebab kemiskinan, maka pengembangan sumber daya manusia menjadi cara untuk mengatasi kemiskinan.

Faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan bermuara pada teori

lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*). “*a poor country is poor because it is poor*” (Negara miskin itu miskin karena dia miskin).

a) Garis kemiskinan (GK)

Garis kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponennya itu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

$$GK = GKM + GKNM$$

Perhitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

1. Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak konsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin.

2. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Ukuran kemiskinan

- a) Head Count Index (HCI-P 0), yaitu persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

- b) Indeks Keadalam Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- c) Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Indeks-P2) adalah ukuran yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimoangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Untuk menunjang keberhasilan strategi yang bersifat langsung ke masyarakat diperlukan unsur-unsur berikut (Sahdan, 2005):

1. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, terpadu, lintas sektor, dan sesuai dengan kondisi dan budaya lokal, karena tidak ada satu kebijakan kemiskinan yang sesuai untuk semua.
2. Memberikan perhatian terhadap aspek proses, tanpa mengabaikan hasil akhir dari proses tersebut. Biarkan orang miskin merasakan bagaimana proses mereka bisa keluar ddari lingkaran setan kemiskinan.
3. Melibatkan dan merupakan hasil proses dialog dengan berbagai pihak dan konsultan dengan segenap pihak yang berkepentingan terutama masyarakat miskin.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian di kalangan semua pihak yang terkait, serta membangkitkan gairah mereka yang terlibat untuk mengambil peran yang sesuai agar tercipta rasa memiliki program.
5. Menyediakan ruang gerak yang seluas-luasnya, bagi munculnya aneka inisiatif dan kreativitas masyarakat di berbagai tingkat. Dalam

hal ini, pemerintah lebih berperan hanya sebagai inisiator, selanjutnya bertindak sebagai fasilitator dalam proses tersebut, sehingga akhir-akhirnya, kerangka dan pendekatan penanggulangan kemiskinan ddisepakati bersama.

6. Pemerintah dan pihak lainnya dapat bergabung menjadi kekuatan yang saling mendukung.
7. Mereka yang bertanggung jawab dalam menyusun anggaran belanja harus menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan ini sehingga upaya ini ditempatkan dan mendapat prioritas utama dalam setiap program disetiap instansi. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan menjadi gerakan dari, oleh dan untuk rakyat.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dengan demikian pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu. Pembangunan ekonomi juga dapat dikatakan sebagai suatu proses yang dapat menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembangaan. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan kenaikan Produk Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional Bruto tanpa melihat apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk serta apakah terjadi perubahan dalam struktu ekonomi (Arsyad, 2015).

Menurut t4eori klasik Adam Smith terdapat 2 aspek utama penentu pertumbuhan ekonomi yaitu (1) pertumbuhan ekonomi GDP total dan (2)

pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan GDP total dapat dicapai jika suatu negara memperoleh keuntungan dari kegiatan spesialisasi. Spesialisasi dapat terwujud jika tersedianya pasar yang luas untuk menampung hasil produksi. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi tolak ukur pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi juga dapat menjelaskan perkembangan kegiatan ekonomi yang terjadi disuatu negara, seperti peningkatan jumlah barang-barang industri, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan produksi yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun (Dumairy, 2018).

Menurut teori pertumbuhan Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak dari pendapatan nasionalnya. Namun demikian diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal untuk menumbuhkan perekonomian tersebut. Hubungan tersebut biasa dikenal dengan istilah rasio modal-*output* (COR). Dalam teori ini juga disebutkan bahwa, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya jika ingin perekonomiannya tumbuh. Semakin banyak tabungan yang dimiliki dan kemudian di investasikan, maka semakin sepat pula perekonomian tersebut akan tumbuh (Aulia, 2022).

Harrod-Domar menganalisis hubungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan melihat bahwa pada suatu tingkat pendapatan nasional tertentu yang cukup untuk menyerap seluruh tenaga kerja dengan tingkat upah di satu periode maka periode berikutnya tidak akan mampu lagi untuk menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia, sehingga untuk menumbuhkan perekonomian diperlukan investasi baru sebagai tambahan modal yang digunakan untuk mencapai tingkat penyeraoan tenaga kerja yang penuh pada periode berikutnya.

Harrod-Domar memberi peranan kunci investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, terutama mengenai sifat yang dimiliki investasi yaitu dapat menciptakan pendapatan yang merupakan dampak dari permintaan investasi dan investasi juga dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok kapital yang merupakan dampak dari penawaran investasi. Oleh karena itu selama investasi neto tersedia dan tetap berlangsung maka pendapatan riil dan output akan meningkat.

Model pertumbuhan model Solow dalam Osiope (2019) lebih menekankan pada rangkaian kegiatan produksi dengan empat faktor utama, yaitu tenaga kerja, akumulasi modal, teknologi, dan *output*. Teori ini meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan perkapita. Namun, tanpa adanya perkembangan teknologi, peningkatan tersebut tidak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Mankiw dalam Magdalena & Suhatman (2020) mengatakan pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi makro jangka panjang yang dimana pada setiap periode masyarakat negara akan berusaha meningkatkan kemampuannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang menjadi sasarannya adalah meningkatkan tingkat produksi riil (pendapatan nasional) dan taraf hidup (pendapatan riil per kapita) melalui penyediaan dan mobilisasi faktor-faktor produksi. Dengan meningkatkan faktor produksi tersebut diharapkan dapat menambah modal, produksi setiap pekerja atau dengan kata lain akan menambah cadangan devisa. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai peningkatan produk domestik bruto (PDB) riil suatu negara pada tahun tertentu yang dapat menunjukkan peningkatan pendapatan per kapita setiap orang dalam perekonomian dan di suatu negara pada tahun tertentu.

New growth theory dalam Romer (1997) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang hanya dapat tercipta apabila terjadi kemajuan teknologi dan pengembangan sumberdaya manusia. Negara yang mempunyai tingkat kemajuan teknologi yang lebih cepat mempunyai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemajuan teknologi tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

2.1.3 Upah Minimum

Sumarsono (2003) mengemukakan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.

Adapun tujuan yang ditetapkannya upah minimum menurut Asyhadie (2007) yaitu: 1) untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja/ buruh sebagai subsistem dalam suatu hubungan kerja, 2) untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang secara materi kurang memuaskan, 3) untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan, 4) untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan, dan 5) mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal.

Pemerintah menetapkan upah harus dibayar oleh perusahaan kepada pekerja, upah ini diberi nama upah minimum. Bagi sebagian pekerja, upah minimum ini tidak berpengaruh karena mereka sudah menikmati upah di atas

upah minimum. Bagi sebagian lainnya, terutama yang tidak terdidik dan tidak berpengalaman hal ini berpengaruh, karena upah minimum mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan (Mankiw, 2006).

Menurut teori upah efisiensi (*efficiency-wage*) dalam (Istifaiyah, 2015), menunjukkan bahwa upah yang banyak membentuk aktivis makin menguntungkan. Teori upah efisiensi yang seringkali digunakan di negara-negara miskin berpendapat bahwa upah berpengaruh pada gizi. Para aktivis yang memberi menggunakan upah berkecukupan akan bertambah nutrisi, dan pekerja yang bertambah sehat akan bertambah menguntungkan. Teori efisiensi upah menunjukkan bahwa produktivitas pekerja semakin tinggi bersamaan menggunakan tingkat upah.

Pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 pasal 1 ayat (1), mengatur tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Peraturan tersebut bertujuan mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang dilakukan.

Upah yang diberikan oleh seseorang pekerja tergantung pada kemampuan seorang dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin produktif seorang pekerja maka akan semakin besar upahnya, begitu pula sebaliknya semakin rendah produktivitas seorang pekerja maka akan semakin kecil upah yang dihasilkan. Upah minimum menurut Husni (2000) terdiri atas:

1. Upah minimum Provinsi, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi.
2. Upah minimum Kabupaten/Kota, yaitu upah minimum yang berlaku di Daerah Kabuten/Kota.
3. Upah minimum sektoral Provinsi (UMS Provinsi), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota di satu Provinsi.
4. Upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan upah minimum menurut Djumaldi (2010) bagi pekerja/buruh yang berstatus tidak tetap, maupun dalam masa percobaan, upah diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar upah minimum. Selanjutnya upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun. Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun dilakukan atas dasar kesepakatan antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha. Sementara bagi pekerja dengan sistem kerja borongan, atau berdasarkan satuan hasil yang dilaksanakan satu bulan atau lebih, upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar upah minimum di perusahaan. Upah perja harian lepas ditetapkan secara upah bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari: a) bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, upah bulanan di bagi 25 (du puluh lima) dan b) bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu).

Upah adalah balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia, yang secara luas mencakup gaji, honorarium, uang lembur, dan tunjangan lainnya. Sistem pengupahan diberbagai negara termasuk di indonesia, pada umumnya berada diantara dua ekstrim yaitu teori nilai dan pantangan kelas.

Membahas mengenai upah terutama minimum sering terjadi perdebatan, dimana kebanyakan para ekonom menyatakan bahwa kebijakan peningkatan upah minimum sering menyebabkan terjadinya pengangguran. Namun, mereka berpendapat bahwa pengorbanan itu setimpal untuk mengentaskan kemiskinan kelompok masyarakat lainnya. Struktur dan skala upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan pengelompokan jabatan berdasarkan nilai atau bobot jabatan. Dalam struktur dan skala upah tersebut, tergambar jenjang kenaikan upah standar yang mendasarkan/memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi masing-masing pekerjaan/buruh serta mempertimbangkan kemampuan perusahaan dan produktivitas (Gilarso, 2003).

Pandangan masalah pengupahan juga terdapat perbedaan misalnya ajaran Karl Marx pada dasarnya berpusat pada tiga hal. Pertama adalah *teori nilai*. Berpendapat bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai ekonomi. Jadi nilai suatu barang adalah nilai dari jasa buruh atau dari jumlah waktu kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Implikasi pandangan yang demikian adalah:

1. Harga barang berbeda menurut jumlah jasa buruh yang dialokasikan untuk seluruh proses produksi barang tersebut.
2. Jumlah jasa kerja yang dikorbankan untuk memproduksi sesuatu jenis barang adalah kira-kira sama. Oleh sebab itu, harganya pun di beberapa tempat kira-kira sama.
3. Seluruh pendapatan nasional diciptakan oleh buruh, jadi dengan demikian hanya buruh/pekerja yang berhak memperoleh seluruh pendapatan nasional tersebut.

2.1.4 Inflasi

Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Dari definisi tersebut ada tiga kriteria yang perlu diamati untuk melihat telah terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga, bersifat umum, dan terjadi terus menerus dalam rentang waktu tertentu. Apabila terjadi kenaikan harga satu barang yang tidak mempengaruhi harga barang lain, sehingga tidak naik secara umum, kejadian seperti itu bukanlah inflasi. Kecuali bila yang naik itu seperti harga BBM, ini berpengaruh terhadap harga-harga lain sehingga secara umum semua produk hampir mengalami kenaikan harga. Bila kenaikan harga itu terjadinya sesaat kemudian turun lagi, itu pun belum bisa dikatakan inflasi, karena kenaikan harga yang diperhitungkan dalam konteks inflasi mempunyai rentang waktu minimal sebulan (Murni, 2006).

Inflasi adalah kecenderungan dari harga yang naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas dan mengakibatkan pada sebagian besar dari harga-harga barang lain. Jika inflasi mengalami fluktuasi, maka kegiatan perekonomian akan cenderung menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Dampak dari kenaikan inflasi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Dikarenakan nilai riil pada mata uang mengalami penurunan (Boediono, 2002).

Menurut pemikiran Keynes dia mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga dari keadaan tersebut kemudian nantinya akan menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang-barang akan melebihi jumlah barang-barang yang tersedia, akibatnya akan terjadi inflationary gap. Keadaan keterbatasan jumlah persediaan barang ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan. Dengan

kata lain, dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak mengalami peningkatan secepat kenaikan permintaan yang terjadi (Adwin, 1999).

Inflasi merupakan hal yang wajar, ada variasi penting pada tingkat kenaikan harga. Publik sering memandang laju inflasi yang tinggi ini sebagai masalah utama dalam perekonomian (Mankiw, 2006). Menurut Nanga (2005) atas dasar besarnya laju inflasi, inflasi dapat dibagi ke dalam empat kategori, yakni:

1. Inflasi Ringan, yaitu inflasi yang masih belum mengganggu keadaan ekonomi. Inflasi ini dapat dikendalikan karena harga-harga naik secara umum, tetapi belum mengakibatkan krisis dibidang ekonomi. Inflasi ringan nilainya dibawah 10% per tahun.
2. Inflasi sedang, belum membahayakan kegiatan ekonomi, tetapi inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang tetap. Inflasi sedang berkisar antara 10%-30%.
3. Inflasi berat, inflasi ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian. Pada kondisi inflasi berat ini orang cenderung menyimpan barang. Orang tidak mau untuk menabung karena bunga bank lebih rendah dari laju inflasi. Inflasi ini berkisar 30%-100% per tahun.
4. Hypeinflasi, inflasi ini sudah mengacaukan perekonomian dan susah dikendalikan walaupun dengan tindakan moneter dan tindakan fiskal. Inflasi sangat berat ini nilainya diatas 100% per tahun.

Secara umum, inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, dimana bila inflasi itu ringan akan berpengaruh positif terhadap perekonomian, artinya bisa meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan minat masyarakat untuk menabung serta berinvestasi. Sebaliknya, pada saat terjadi inflasi yang parah yaitu pada saat terjadi inflasi yang tak terkendali (hiperinflasi) keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu,

orang tidak bersemangat untuk menabung, berinvestasi dan memproduksi karena harga meningkat dengan cepat, para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri sipil, karyawan swasta serta pekerja buruh kewalahan mengimbangi harga barang sehingga kehidupan masyarakat akan terpuruk dari waktu ke waktu.

Ada beberapa dampak inflasi terhadap perekonomian diantaranya adalah (Iskandar, 2005):

1. Bila harga barang secara umum naik terus menerus maka masyarakat akan panik sehingga masyarakat akan terlalu banyak mengeluarkan uang untuk membeli barang.
2. Masyarakat cenderung menarik uang mereka di bank untuk membeli barang sehingga bank akan kekurangan dana yang dapat menyebabkan bangkrutnya bank atau rendahnya dan investasi yang tersedia.
3. Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kerja dengan menaikkan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran, sehingga harga akan terus naik.
4. Distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan dekat dengan masyarakat yang memiliki uang banyak.

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi (persentase pertambahan kenaikan harga) berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara dengan negara lain. Adakalanya tingkat inflasi adalah rendah yaitu mencapai dibawah 2 atau persen. Tingkat inflasi yang menderat mencapai diantara 4-10 persen. Inflasi yang sangat serius

mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus persen dalam setahun (Sadono, 2012).

Berdasarkan kepada sumber inflasi juga dapat dilihat menurut sebabnya seperti berikut ini:

1. Demand-pull inflation, disebabkan oleh permintaan masyarakat akan barang-barang (agregat demand) bertambah. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.
2. Cost push inflation, yang ditandai dengan kenaikan biaya produksi, yang disebabkan oleh terdepresiasinya nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Ada tiga kelompok mengenai inflasi yang membahas tentang aspek-aspek tertentu, tiga teori tersebut yaitu (Sukirno, 2006):

- a. Teori kuantitas, bahwa inflasi itu hanya biasa terjadi kalau ada penambahan volume jumlah uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Bila terjadi kegagalan panen misalnya, yang menyebabkan harga beras naik tetapi apabila jumlah uang beredar tidak ditambah, maka kenaikan harga beras akan berhenti dengan sendirinya.
- b. Teori keynes, kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh masyarakat.
- c. Teori strukturalis, teori jangka panjang yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi. Karena struktur penambahan produksi barang-barang

ini terlalu lambat dibandingkan dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat, akibatnya penawaran barang kurang dari yang dibutuhkan masyarakat sehingga harga barang dan jasa meningkat.

Masalah lainnya yang terus-menerus mendapat perhatian pemerintah adalah masalah inflasi. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi nol persen bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena ia adalah sukar untuk dicapai, yang terpenting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah.

Adakalanya tingkat inflasi meningkat tiba-tiba atau wujud sebagai akibat suatu peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah- misalnya efek dari pengurangan nilai mata uang (depresiasi nilai uang) yang sangat besar atau ketidakstabilan politik. Menghadapi masalah inflasi yang bertambah cepat ini pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan harga-harga dapat diwujudkan kembali.

1. Jenis-jenis inflasi

Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku biasanya dapat dibedakan kepada tiga bentuk berikut:

a. Inflasi tarikan permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan sangat pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi yang mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini menimbulkan inflasi.

b. Inflasi desakan biaya

Inflasi ini juga berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-

perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

c. Inflasi di impor

Inflasi juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang di impor. Inflasi ini akan wujud apabila barang-barang impor mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Satu contoh yang nyata dalam hal ini adalah efek kenaikan harga minyak dalam tahun 1970an kepada perekonomian negara-negara barat dan negara-negara pengimpor minyak lainnya. Minyak penting dalam proses barang-barang industri. Maka kenaikan harga minyak tersebut menaikkan biaya produksi, dan kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga-harga.

2.1.5 Investasi

Tandellin (2001) mengemukakan bahwa investasi adalah komitmen atas dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Sementara Ahmad (2014) mengartikan investasi sebagai menempatkan atau keuntungan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sunaryah, 2003). Pembentukan modal kumulatif secara kesinambungan dengan melakukan investasi dalam

bentuk pembelian mesin-mesin, perusahaan, pabrik, jalan raya dan infrastruktur lainnya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas. Di negara berkembang rendahnya pendapatan disebabkan oleh rendahnya produktivitas hal ini karena kurangnya faktor input yang kurang memadai. Kurangnya modal dapat dilihat dalam seberapa sudut yaitu : (1) kecilnya jumlah modal material (modal fisik); (2) rendahnya kapasitas dan kemampuan penduduk; (3) rendahnya investasi neto (Jhingan, 2004).

Investasi merupakan faktor yang paling penting guna mencapai target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan wilayah. Dalam perekonomian dikenal istilah investasi dan setiap pelaku usaha akan mencari peluang-peluang untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Nurkse menyatakan bahwa "masyarakat tidak menggunakan seluruh aktivitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsinya, tapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang modal seperti perkakas, alat-alat mesin, fasilitas angkutan pabrik dan segala dan segala macam bentuk modal nyata yang nyata dengan cepat meningkatkan manfaat upaya produktif" (Suharlina, 2020).

Sedangkan menurut Teori Neo Klasik dalam Jhingan (2004) Teori pertumbuhan ekonomi menekankan pentingnya tabungan sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat laju perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk. Makin cepat perkembangan volume stok capital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Menurut Teori Klasik bahwa investasi merupakan suatu pengeluaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan untuk meningkatkan produksi. Jadi investasi merupakan pengeluaran yang akan menambah jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat dimana pada akhirnya akan menambah

pendapatan, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Sehubungan dengan itu, maka sudah sewajarnya pemerintah melakukan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan masuknya investasi (Wahyuni, 20).

Harrod-Domar mengembangkan teori keynes dengan memberi peranan kunci investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai sifat ganda yang dimiliki investasi (Sulistiawati, 2012). Pertama, investasi menciptakan pendapatan (merupakan dampak dari permintaan investasi), dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok kapital (merupakan dampak dari penawaran investasi). Kemudian Solow dan Swan mengoreksi Teori Harrod-Domar dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Asumsi yang digunakan adalah skala pengembalian yang konstan (*constan return to scale*), substitusi antara modal (K) dan tenaga kerja (L) bersifat sempurna, dan adanya produktivitas marjinal yang semakin menurun (*diminishing marginal productivity*) dari tiap inputnya.

Melihat kondisi indonesia, setidaknya ada lima alasan mendasar mengapa indonesia membutuhkan investasi asing saat ini (Kurniawan, 2019):

- a. Penyediaan lapangan kerja
- b. Mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa
kehadiran penanaman modal asing dapat dipergunakan untuk membantu mengembangkan industri substitusi impor dalam rangka menghemat devisa.
- c. Mendorong berkembangnya industry barang-barang ekspor non-migas untuk mendapatkan devisa.
- d. Pembangunan daerah-daerah tertinggal. Investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang

dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan, listrik, air bersih, jalan, rel kereta api, dan lain-lain.

- e. Alih teknologi, salah satu tujuan mengundang modal asing adalah untuk mewujudkan alih teknologi.

2.2 Keterkaitan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan suatu indikator yang penting untuk dapat melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap negara akan selalu bekerja keras agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. setiap negara di seluruh negara syarat utama bagi terciptanya penurunan angka kemiskinan ialah pertumbuhan ekonomi. namun kondisi di negara-negara yang berkembang termasuk indonesia pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar disetiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin (Hermanto dan Dwi, 2007).

Menurut Kunznet (dikutip dari Tulus Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal

proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Sesuai dengan studi empiris yang dilakukan penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Menurut penelitian Desrini dan Puti (2018) terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Untuk menurunkan kemiskinan pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan, karena apabila pertumbuhan ekonomi disuatu daerah tersebut meningkat maka banyak juga keinginan orang untuk berinvestasi secara otomatis banyak lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga tingkat pengangguran bisa ditekan yang berdampak pada kecilnya tingkat kemiskinan. Secara umum, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan sering menjadi perdebatan, namun terdapat suatu kesepakatan bahwa pertumbuhan diperlukan meskipun bukanlah menjadi satu-satunya faktor yang dapat mengurangi angka kemiskinan (Gupta & Mitra, 2004).

Hubungan antara pertumbuhan dan kemiskinan juga ditunjukkan (Datt et al, 2020) dalam penelitiannya di India mengindikasikan terjadinya percepatan pengurangan angka kemiskinan yang disertai pertumbuhan ekonomi pasca reformasi meskipun kesenjangan masih cukup besar (Jalles, 2011) dalam risetnya di 10 Negara persemakmuran terutama di Rusia, Kazakshtan dan Azerbaijan menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dan meluas serta bercirikan keberpihakan pada rakyat miskin tidak berdampak terhadap pengurangan kemiskinan di Negara-Negara tersebut. Meskipun secara umum manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan, tetapi masih

ada sebagian masyarakat di daerah yang sangat miskin tidak merasakan manfaatnya. Namun demikian, jika disparitas pendapatan tidak berubah yang berimbas pada lambatnya pengurangan angka kemiskinan, maka aspek kebijakan sangat penting untuk diperhatikan, khususnya menyagkut redistribusi pendapatan.

2.2.2 Hubungan Upah Minimum Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Julianto dan Suparno (2016) Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi (UMP). Upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.

Teori upah efisiensi (*efficiency-wage*) menyatakan upah yang tinggi membuat pekerja lebih produktif. Jadi, meskipun pengurangan upah akan menurunkan tagihan upah perusahaan, itu juga akan menurunkan produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Teori upah-efisiensi yang keempat menyatakan upah yang tinggi meningkatkan upaya pekerja. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat memantau dengan sempurna upaya para pekerja dan para pekerja harus memutuskan sendiri sejauh mana mereka akan bekerja keras. Semakin tinggi upah, semakin besar kerugian bagi pekerja bila mereka sampai dipecat. Dengan membayar upah yang lebih tinggi, perusahaan memotivasi lebih banyak pekerja agar tidak bermalas-malasan dengan

demikian meningkatkan produktivitas mereka. Keempat teori upah-efisiensi ini secara rinci berbeda, namun teori-teori tersebut menyuarakan topik yang sama: karena perusahaan beroperasi lebih efisien jika membayar pekerjaannya dengan upah yang tinggi, maka perusahaan dapat, menganggap bahwa mempertahankan upah diatas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan adalah menguntungkan (Julianto dan Suparno, 2016).

Pada dasarnya besarnya tingkat upah akan menentukan keinginan masyarakat untuk bekerja pada suatu perusahaan. Ketika upah yang ditawarkan oleh perusahaan besar tentunya akan menarik jumlah pekerja. Namun, hal tersebut umumnya berlaku di negara-negara maju. Sedangkan pada negara-negara berkembang hal tersebut tidak berlaku.

2.2.3 Hubungan Inflasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi dipandang sebagai salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, ada berbagai pandangan mengenai dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain pada tahun 1958, philips menyatakan bahwa inflasi yang tinggi secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan tingkat pengangguran. Pendapat tersebut juga didukung oleh para tokoh prerspektif struktural dan keynesian yang percaya bahwa inflasi tidak berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi sedangkan pandangan monetarist berpendapat bahwa inflasi berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi. hal ini didukung oleh peristiwa pada tahun 1970 dimana negara-negara dengan inflasi yang tinggi terutama negara-negara Amerika Latin mulai mengalami penurunan tingkat pertumbuhan dan dengan demikian menyebabkan munculnya pandangan yang menyatakan inflasi yang memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi bukan efek positif.

Inflasi berperang penting dalam menentukan kondisi perekonomian, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan

khususnya otoritas moneter yang bertanggung jawab mengendalikan inflasi. Dalam jangka panjang, Inflasi mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi seperti penetapan harga dan upah, konsumsi dan investasi. Melalui inflasi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perekonomian. Inflasi ditemukan memiliki dampak progresif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (Maggi, 2013).

Hal ini tentunya menyebabkan berbagai pabrik, perusahaan, maupun wiraswasta lokal yang akan bangkrut. Dalam hal ini, masyarakat akan kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, inflasi pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pengangguran. Sebaliknya, jika harga mengalami deflasi maka penyerapan tenaga kerja akan menurunkan angka pengangguran. Hal ini sesuai dengan teori philip yang menyatakan bahwa, hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran adalah berbanding negatif. Tapi pada dasarnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu inflasi di bawah sepuluh persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha, untuk lebih meningkatkan produksinya. Pengusaha mendapat lebih banyak keuntungan. Selain itu, peningkatan produksi memberi dampak positif lain, yaitu tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi sepuluh persen (Simanungkalit, 2020).

2.2.4 Hubungan Investasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stock barang modal. Stock barang modal terdiri dari pabrik, mesin, kantor dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Barang modal juga meliputi perumahan tempat tinggal dan

juga persediaan. Investasi adalah pengeluaran tambahan kepada komponen barang-barang modal (Dornbusch dan Fischer, 2008)

Investasi merupakan komponen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu hubungan yang sederhana sangat penting untuk menahan investasi secara teori peningkatan investasi akan mendorong volume perdagangan per kapita sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi memiliki peran penting dalam permintaan agregat (Nujum & Rahman, 2019).

Investasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran disuatu daerah. Sebagai akibat yang akan terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut akan menambah output nasional sehingga akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan jika sebagian besar ditopang oleh kegiatan investasi (Rimbawan, 2010). Dalam penelitian Adipuryanti (2015) investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabuten/kota di Provinsi bali.

2.2.5 Hubungan Upah Minimum Dengan Kemiskinan

Dalam dunia usaha, secara sederhana pengupahan diartikan sebagai bentuk kompensasi atas kontribusi yang dilakukan pekerja atau buruh kepada suatu perusahaan. Besarnya upah tentunya sangat berdampak terhadap keinginan masyarakat untuk bekerja pada suatu sektor atau suatu perusahaan. Jika diperhatikan, realitas menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk bekerja lebih mengarah kepada kondisi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat. Hal lebih realistis jika di sesuaikan dengan konteks kelebihan penawaran tenaga kerja pada negara-negara berkembang misalnya indonesia.

Besarnya upah minimum tentunya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan pekerja dengan keluarganya ditentukan oleh besar kecilnya upah yang diterima. Dari segi perusahaan sangat berhati-hati dalam meningkatkan besarnya upah kepada pekerja meskipun proses pengupahan telah diatur undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat upah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena variabel ini menyangkut kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

2.2.6 Hubungan Inflasi Dengan Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) tingginya laju inflasi bisa menaikkan ukuran garis kemiskinan. Pasalnya, harga barang dan jasa menjadi salah satu penentu tolak ukur garis kemiskinan. Kenaikkan inflasi pasti akan menaikkan garis kemiskinan. Sebab, garis kemiskinan juga ditentukan oleh harga barang dan jasa, hanya memang bobotnya yang berbeda. Kenaikan laju inflasi serta ukuran garis kemiskinan, tidak serta-merta menaikkan atau menurunkan angka kemiskinan. sebab, angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan dan efektivitas beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah. Inflasi tidak selalu berdampak buruk bagi perekonomian, terutama inflasi yang terkendali justru dapat meningkatkan kegiatan perekonomian, namun salah satu akibat yang ditimbulkan inflasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat antara lain menurunnya daya beli masyarakat.

Tingkat kemiskinan suatu negara atau wilayah merupakan indikator kesejahteraan masyarakat yang ada didalamnya sedangkan inflasi yang tinggi akan memengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini tentunya menjadi hubungan yang saling memengaruhi. Jika inflasi ringan tentunya berpengaruh positif terhadap perekonomian. Misalnya masyarakat akan cenderung untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang tinggi

(hiperinflasi) akan menciptakan kemiskinan karena masyarakat tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Inflasi bagi kelompok pendapatan rendah akan mengalami penurunan daya beli uang yang dimiliki untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Uang yang dimiliki akan mengalami penurunan daya beli sehingga secara riil pendapatan orang tersebut akan mengalami penurunan seiring kenaikan inflasi. Dalam penelitian Desrini dan Puti (2018) Variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Indonesia. Hasil ini didukung dengan adanya teori bahwa inflasi akan meningkatkan biaya produksi yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan ini mengakibatkan daya beli masyarakat, menurun yang menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan.

2.2.7 Hubungan Investasi Dengan Kemiskinan

Kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja, penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi, dan investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi (Sukirno, 2000). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang negatif. Artinya, pertumbuhan ekonomi akan mengurangi angka kemiskinan di suatu negara atau wilayah. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka tingkat kemiskinan akan meningkat.

2.3 Kajian Empiris

Mutmainnah, dkk (2023) Adapun penelitian ini menggunakan metode data panel menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh terhadap kemiskinan dan secara tidak langsung melalui pengangguran berpengaruh. Akan tetapi, pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh terhadap kemiskinan, akan tetapi secara tidak langsung melalui pertumbuhan maupun pengangguran tidak berpengaruh. Upah minimum provinsi secara tidak langsung melalui pengangguran berpengaruh, akan tetapi secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh.

Eni dan Heny (2016) Berdasarkan hasil penelitian ini dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis path yang dimana inflasi berpengaruh menurunkan kemiskinan melalui pengangguran di provinsi bali. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pengangguran di provinsi bali. Investasi berpengaruh meningkatkan kemiskinan melalui pengangguran di provinsi bali baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel intervening yaitu pengangguran.

Sunusi (2014) Hasil analisis menunjukkan dengan metode yang digunakan adalah analisis path, bahwa variabel tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah serta kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara. Khusus di Sulawesi Utara Pertumbuhan Ekonomi mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 terjadi kenaikan Pertumbuhan Ekonomi dari setiap tahunnya. Sedangkan, pada tahun 2010 terjadi penurunan. Kenaikan dan penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah, dan kemiskinan. Jumlah angkatan kerja di Sulawesi Utara terus mengalami kenaikan. Begitu pula yang terjadi pada tingkat

pendidikan dan pengeluaran pemerintah yang terus mengalami kenaikan. Berbeda dengan tingkat kemiskinan dimana setiap tahunnya mengalami penurunan yang dilihat dari keberhasilan tenaga kerja yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Adapun penelitian sebelumnya yang menggunakan metode analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia (Ningsih dan Andiny (2018), Purnama (2016)).

Daftian, dkk (2017) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa investasi dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi dan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan negatif dan signifikan. Pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebesar -38,6%, selanjutnya pengaruh tenaga kerja terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebesar -29,8%. Untuk itu pemerintah lebih menekankan pertumbuhan ekonomi yang merata agar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat miskin.

Penelitian yang menggunakan metode OLS. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan sedangkan kesempatan kerja terhadap kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Adapun hasil penelitian yang sama menggunakan metode OLS. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, PDRB Per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk (Nurfitri & Prima, 2011).

Romi & Umiyati (2018) melakukan penelitian menggunakan metode regresi linear berganda dalam bentuk semilog. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Jambi periode 2001-2015 sebesar 6,28 persen, pertumbuhan upah minimum Provinsi Jambi sebesar 14,30 persen dan pertumbuhan penduduk miskin sebesar 17,84 persen, secara simultan pertumbuhan ekonomi dan upah minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Jambi, sedangkan secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan adalah upah minimum Provinsi.

Ika (2012) Pengaruh Investasi Melalui Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan, hasil analisis: Investasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara untuk kemiskinan tidak memberikan pengaruh. Vinny (2014) Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau, hasil penelitian: Tingkat Pengangguran tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap kemiskinan sementara tingkat upah minimum provinsi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Seri (2016) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014, hasil penelitian: Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, dan investasi berpengaruh negative terhadap kemiskinan sementara pengangguran memberikan pengaruh yang positif terhadap kemiskina.